



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI)
UNIT KERJA : AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA II

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NELSON AMBARITA
2. Jabatan : AUDITOR UTAMA
3. NHK : 189187

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.537.280.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 608 m2/90 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 531.280.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 178 m2/173 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
4. Tanah Seluas 360 m2 di KAB / KOTA TAPANULI UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 141.000.000
5. Bangunan Seluas 95 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 195.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 647 m2/150 m2 di KAB / KOTA CIANJUR, HASIL SENDIRI Rp. 820.000.000
7. Tanah Seluas 330 m2 di KAB / KOTA TAPANULI UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. ----

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 197.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 377.086.423

F. HARTA LAINNYA

Rp. 235.450.502

Sub Total

Rp. 3.346.816.925

III. HUTANG

Rp. 170.986.408

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.175.830.517



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.